

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	o
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Landasan Teoretis	20
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulian	39
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA, INFRASTRUKTUR JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS	42
A. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam	42
B. Kewenangan Perizinan Perusahaan Tambang Mineral dan Batu Bara	52
C. Infrastruktur Jalan Umum dan Jalan Khusus	58
1. Pemanfaatan Jalan Negara sebagai Alternatif Pengelolaan di Luar Penggunaan/Peruntukan	65
2. Pemanfaatan Jalan Sebagai Perwujudan Keadilan Sosial .	66
3. Variasi Penyalahgunaan Jalan Umum	67
4. Perbandingan Pemanfaatan Jalan untuk transportasi di Daerah lain	68

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATUR KEWAJIBAN PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA TERKAIT INFRASTRUKTUR JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS DI PROVINSI JAMBI	72
A. Pengaturan Kewenangan dan Sumber Kewenangan	72
B. Pengaturan Kewenangan Gubernur (Kepala Daerah) Terhadap Pengelolaan Transportasi Tambang Mineral Dan Batu Bara	81
C. Otonomi Daerah dan Kewenangan Pengaturan Terhadap Kewajiban Perusahaan Tambang Batu bara Terkait Infrastruktur Jalan Umum Dan Khusus Di Provinsi Jambi	87
BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN AKIBAT HUKUM DALAM MEMANFAATKAN JALAN UMUM DAN KHUSUS TERKAIT TRANSPORTASI TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA	104
A. Kebijakan Pemerintah	104
B. Eksistensi Peraturan Daerah Sebagai Kebijakan Pemerintah Daerah	109
C. Akibat Hukum Terhadap Pemanfaatan Jalan Umum Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara	116
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137